

Politik Hijrah Kartosuwiryo; Menuju Negara Islam Indonesia

Riyadi Suryana

Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga, Yogyakarta
Email: riyadi.suryana@gmail.com

Keywords:	Abstract:
Politics of Hijrah, Kartosuwiryo, Islamic State of Indonesia	This research explores about the Politics of Hijrah by Sekarmadji Maridjan Kartosuwiryo. Been inheriting the narrative expertise from the figure of the awakening of Islam in Indonesia as well as the founder of PSII (Syarikat Islam Indonesia Party), HOS Cokroaminoto, Kartosuwiryo existed to continue the struggle of Islam in Indonesia through the Politics of Hijrah concept. The main problems in this research are the beginning, the conceptual framework, and the function of the Politics of Hijrah which was initiated by S.M. Kartosuwiryo. Therefore, the limitation of this study is the problematics of the Politics of Hijrah in the period between 1931 and 1962. Written in political science approach, this research aims to explore the details of the circumstances in Indonesia before the independence, the history and struggle of Kartosuwiryo, and the justification of the Politics of Hijrah itself. This research found that there were several groups or organisation founded political parties competed the ideology of nationalist and Islamist, thus this condition has differentiated the direction of the movement shown by each of the political parties. According to this, some of the parties have made coordination with the Dutch Indies government, while some others have chosen the non-coordinative way. Kartosuwiryo has chosen the later through the idea of the Politics of Hijrah and proclaimed the establishment of Islamic State of Indonesia.

Kata kunci:	Abstrak:
Politik Hijrah, Kartosuwiryo, Negara Islam Indonesia	Penelitian ini membahas tentang Politik Hijrah Sekarmadji Maridjan Kartosuwiryo. Sosok yang mewarisi keahlian narasi dari tokoh kebangkitan Islam di Indonesia yakni HOS Cokroaminoto sekaligus pendiri PSII (Partai Syarikat Islam Indonesia) pada periode selanjutnya speninggal HOS Cokroaminoto, Kartosuwiryo muncul dengan melanjutkan perjuangan Islam di Indonesia melalui konsep Politik Hijrah. Pokok masalah dalam peneitian ini adalah mengenai awal kemunculan politik hijrah, konsep politik hijrah, dan fungsi politik hijrah yang diusung oleh S.M. Kartosuwiryo. Oleh karena itu batasan penelitian ini adalah mengenai politik hijrah Kartosuwiryo yang problematikanya terjadi pada rentang tahun 1931 sampai 1962. Ditulis dengan menggunakan pendekatan ilmu politik, penelitian ini bertujuan menggali informasi seputar kondisi Bangsa Indonesia Menjelang Kemerdekaan, Riwayat dan Perjuangan Kartosuwiryo, dan mengapa politik hijrah ini dilakukan. Dari Penelitian ini setidaknya penulis memperoleh informasi bahwa setidaknya terdapat berbagai kelompok maupun organisasi yang membentuk partai politik, ada semacam persaingan antara kelompok nasionalis dan islamis, maka dari dua kondisi berbeda ini masing-masing membuat kelompoknya masing-masing dengan membentuk partai politiknya masing-masing sesuai arah perjuangan kelompoknya. Dilihat dari metode perjuangannya ada yang kooperatif dengan Hindia Belanda, ada juga yang memilih non kooperatif. Kartosuwiryo memilih jalan non kooperatif melalui ide Politik Hijrahnya dengan memproklamirkan berdirinya Negara Islam Indonesia.

Received: August 2, 2019. Revised: September 3, 2019. Accepted: September 16, 2019

1. Pendahuluan

Tahun 1931 menjadi momentum yang penting pada awal kemunculan Politik Hijrah Sekarmadji Maridjan Kartosuwiryo. Berdasarkan hasil kongres PSII yang diadakan di Cirebon, pimpinan PSII bersepakat untuk mengangkat Sekarmadji Maridjan Kartosuwiryo sebagai Sekjen partai. PSII merupakan sebuah partai politik bagian dari kelanjutan dari Serikat Islam yang dibentuk oleh HOS Tjokroaminoto. Berdasarkan fakta sejarah, maka organisasi politik ini adalah perkembangan dari Serikat Dagang Islam yang dibentuk oleh kaum pribumi sebagai upaya mengimbangi dominasi pedagang Cina pada awal abad ke-20 (Holk H. Dangel, 1995: 1).

Pada tahun-tahun berikutnya HOS Tjokroaminoto mengembangkan SI menjadi partai berbasis Islam dengan nama PSII. PSII memiliki azas politik yang dipegang bersama dalam memperjuangkan cita-citanya menuju Indonesia yang merdeka. Partai politik ini senantiasa disiplin dalam melaksanakan apa yang telah menjadi kesepakatan bersama. Ketika partai lain bimbang dalam menentukan arah perjuangan partai, kebingungan antara benar-benar independen dalam memperjuangkan cita-cita partai (*non-cooperatif*) atau perlu siasat lain yakni dengan merapat kepada sang-penguasa (*cooperatif*), yang pada saat itu penguasa dipegang oleh Pemerintahan Hindia Belanda. Jika ia tetap disiplin menjadi organisasi yang independen, maka partai atau organisasi tersebut bersiap-siap untuk menjadi oposisi atas pemerintah. Dampak buruk yang diterima partai antara lain: tidak akan ada bantuan dana yang masuk ke partainya, dan sulitnya izin operasional kegiatan jelas partai juga akan mengalaminya. Itulah dampak nyata yang akan diterima jika organisasi/partai politik saat itu memilih jalan *non-cooperative* (Yusuf Yunan, 2005: 345). *Non-cooperatif* adalah suatu sikap tidak bekerja sama dalam merealisasikan sebuah cita-cita organisasi dengan pihak penguasa yang ada.

Politik hijrah PSII muncul atas kegiatan politik partai terhadap penguasa yang ada yakni Pemerintahan Hindia Belanda. PSII ingin memperjelas sikap politiknya itu yakni *non-cooperatif*. Apakah sikap *non-cooperatif* itu selesai hanya sebatas suatu tindakan yang tidak berkoalisi dengan penguasa? Pada fase berikutnya pertanyaan dasar ini yang mengakibatkan terjadinya perpecahan di kubu PSII itu sendiri (Irfan S. Awwas, Uswah, 2008: 57). Haji Agus Salim memiliki pandangan yang berbeda tentang Politik hijrah PSII, ia berpandangan bahwa politik hijrah itu hanyalah strategi partai untuk memperjuangkan cita-cita partai, ia terbatas pada ranah politik saja.

Pada periode Orde Baru kajian yang berkaitan dengan Kartosuwiryo menjadi topik yang sangat sensitif, ada banyak hal yang perlu digali dari isu tersebut. Sisa-sisa pemikiran Kartosuwiryo nampaknya masih membekas di beberapa kalangan masyarakat, khususnya di wilayah-wilayah yang dulunya menjadi basis pergerakan Kartosuwiryo melalui gerakan Darul Islamnya. Pada masa orde baru tidak sedikit kerusuhan demi kerusuhan yang mengatasnamakan perjuangan ideology agama terjadi. Meski tergolong berbeda-beda warna bendera namun secara umum kerusuhan yang terjadi atas dasar perjuangan ideology keagamaan dapatlah dipetakan bahwa semua kerusuhan tersebut akan bermuarakan pada satu tujuan yakni pemberlakuan syariat islam sebagai aturan hidup manusia di Negara Indonesia.

Pada perkembangan berikutnya di masa era reformasi ini, isu mengenai perjuangan pendirian Negara Islam Indonesia muncul kembali, tidak sedikit kalangan pemuda-pemudi, kalangan mahasiswa banyak terbawa dalam kelompok organisasi ini, selama beberapa bulan isu ini menjadi sorotan utama media masa juga pemerintah saat itu. Hal ini tentu menjadi pr tambahan bagi penulis untuk menggali lebih dalam melalui tokoh yang sempat menjadi pionir gerakan perjuangan semacam ini, hal tersebut peneliti wujudkan dalam pembahasan melalui politik hijrah Kartosuwiryo.

2. Metodologi

Dalam penelitian ini, peneliti menggali, menganalisa, membentuk pemahaman serta menuliskan hasil penelitian ini dengan menggunakan pendekatan ilmu politik. Politik menjadi jalan dalam pendekatan ini, dikarenakan subjek maupun objek pembahasan dalam penelitian ini jelas termasuk pada kategori kajian politik.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian literatur, yaitu penelitian yang menggunakan sumber- sumber tertulis. Maka dari itu penelitian ini berbicara tentang peristiwa yang telah terjadi pada masa lampau, sehingga metode yang digunakan menggunakan metode historis, yaitu sebuah metode yang ditempuh melalui proses menguji dan menganalisis secara kritis terhadap rekaman-rekaman sejarah peristiwa masa lampau, yang kemudian direkonstruksi secara imajinatif melalui proses historiografi.

Pokok masalah dalam penelitian ini adalah mengenai awal kemunculan politik hijrah, konsep politik hijrah, dan fungsi politik hijrah yang diusung oleh S.M. Kartosuwiryo. Oleh karena itu batasan penelitiannya adalah mengenai politik hijrah Kartosuwiryo yang problematikanya terjadi pada rentang tahun 1931 sampai 1962. Tahun 1931 menandai awal karir setrategis Kartosuwiryo, dengan diangkatnya Kartosuwiryo menjadi Sekjen Partai PSII telah memberikan tempat yang strategis dalam menawarkan ide dan gagasan politiknya yang berkaitan dengan politik hijrah. Tahun 1962 Kartosuwiryo meninggal, sehingga penelitian ini pun dirasa cukup pembatasannya sampai dengan tahun meninggalnya Kartosuwiryo.

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut: 1). Menggali informasi seputar situasi politik Bangsa Indonesia menjelang kemerdekaan. 2). Mengupas riwayat dan perjuangan politik Kartosuwiryo. 3). Mengungkap alasan Kartosuwiryo mengembangkan konsep dan pemikiran politik hijrah tersebut.

3. Hasil dan Pembahasan

a. Pergerakan Kebangkitan Nasional Indonesia

Di Indonesia cikal-bakal kebangkitan nasionalisme, ditandai dengan berdirinya organisasi-organisasi yang diprakarsai oleh tokoh-tokoh pergerakan nasional, yang berarti telah tumbuh kesadaran kaum pribumi mengenai politik berkebangsaan. Berbicara tentang politik pada masa pergerakan nasional Indonesia tentu tidak lepas dari dinamika perkembangan partai politik, khususnya gejolak yang terjadi di antara kepentingan antarpolitical yang ada dan ketegangan antara partai politik dengan Pemerintah Hindia Belanda.

Islam telah menyumbang awal pergerakan perjuangan perlawanan Bangsa Indonesia dengan berdirinya organisasi yang pertama kali lahir yakni Sarekat Dagang Islam (SDI), organisasi ini diprakarsai oleh H. Samanhudi lahir pada tahun 1905 di Surakarta. Tujuan organisasi ini pada mulanya adalah membentuk suatu perserikatan yang kuat di kalangan pedagang batik Solo agar mampu bersaing dengan pedagang Cina, sekaligus memajukan Agama Islam. Dengan demikian, selain mengusung corak religiusitas, berdirinya SDI juga dilandasi faktor ekonomi, yaitu disebabkan oleh sistem monopoli dagang Cina yang sangat meresahkan pedagang pribumi. Pada tahun 1911, SDI berganti nama menjadi Sarekat Islam (SI), tahun 1923 menjadi Partai Sarekat Islam (PSI), tahun 1927 menjadi Partai Syarikat Islam Hindia Timur, dan sejak tahun 1930 berubah menjadi Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII). Demikianlah SDI mengalami perkembangan pesat karena sifatnya yang nasionalis, religius, dan ekonomis sehingga tujuan partai ini pun makin berkembang ke arah yang lebih luas.

Organisasi nasionalis yang pertama kali lahir adalah Budi Utomo yang berdiri tahun 1908 dengan pola kepengurusan yang modern, memiliki struktur organisasi pengurus tetap, anggota,

tujuan dan rencana kerja dengan aturan-aturan yang jelas. Budi Utomo diprakarsai oleh dr. Wahidin Sudirohusodo, yang sejak tahun 1906 mulai keliling Pulau Jawa untuk mendirikan *studiefonds* atau dana pelajar. Oleh karena itu, ia mendorong para pelajar untuk mendirikan sebuah organisasi agar mereka memiliki posisi tawar yang kuat di mata pemerintah Hindia Belanda. Organisasi tersebut kemudian dinamai Budi Utomo yang dideklarasikan pada 20 Mei 1908 bertempat di Gedung STOVIA Jakarta.

Lahir pula partai bercorak nasionalis yang idenya bermula dari para pengurus *Algemeene Studie Club* (Kelompok Belajar Umum) di Bandung pada tanggal 4 Juli 1927 (Hoesein Rushdy, 2010: 162). Adapun para pengurus yang dimaksud terdiri dari: Ir. Soekarno, Mr. Sartono, dr. Samsi, Mr. Iskaq Cokrohadiuryo, Mr. Budiarto, Mr. Ali Sastroamijoyo, Mr. Sunario, dan Ir. Anwari. Pada mulanya perkumpulan ini dinamakan Perserikatan Nasional Indonesia namun kemudian berganti nama menjadi Partai Nasional Indonesia (PNI). Tujuan partai ini adalah menggalang persatuan dan kesadaran nasionalisme untuk mencapai kemerdekaan Indonesia (Robert Cribb, 2004: 339).

Kemunculan kesadaran nasionalisme dikalangan tokoh pergerakan politik di Indonesia, dalam kondisi demikian situasi antar partai politik pada kurun 1927 sampai kedatangan penjajah Jepang (1942) tidak mengalami perkembangan yang berarti. Secara formal memang telah dibentuk suatu permufakatan yang mengacu pada kepentingan bersama, namun perbedaan ideologi masing-masing partai menjadi benturan yang tak terelakkan karena selalu muncul pergolakan politik antara sesama kelompok Islam atau kelompok Islam dengan kelompok nasionalis. Terdapat serangkaian debat publik di pers dan rapat-rapat umum antara para intelektual Muslim dengan intelektual sekuler, terutama menyangkut persoalan ideologi politik dan proses untuk menuju kemerdekaan Indonesia (Latif dan Yudi, 2005: 296).

Dalam hubungannya dengan konsentrasi nasional, maka dibentuklah Gabungan Politik Indonesia (Gapi) atas prakarsa dari Partij Indonesia Raya (Parindra) pada tanggal 29 Mei 1939. Di dalam bendera Gapi tersebut duduklah di antaranya adalah Parindra, Garindo, dan Pasundan. Puncak pimpinan Gapi diduduki oleh Abikusno Tjokrosujoso dari PSII (Darul Aqsha, 2005: 70). Beberapa tokoh penting lain yang berada di tubuh Gapi adalah Amir Sjarifuddin dari Gerindo, dan Muhhammad Husni Thamrin dari Parindra. Adapun tujuan dari federasi tersebut adalah untuk mempersatukan partai politik Indonesia, menuntut Indonesia berparlemen, dan menghadapi berbagai kemungkinan yang terjadi akibat Perang Dunia II.

Pada tahun 1938-1945, Perang Dunia II meletus antara Jerman, Italy, dan Jepang melawan pihak sekutu yang terdiri dari Inggris, Prancis, Rusia, Amerika. Front Pasifik meletus tanggal 8 Desember 1941 ketika Amerika membalas Jepang yang menjatuhkan bom di salah satu pangkalan militer Amerika (Pearl Harbour) (Ananta Toer, 2003: 878). Di sisi lain, Hindia Belanda di bawah jajahan Belanda melalui pidato Ratu Wilhelmina mengumumkan perang kepada Jepang. Hal tersebut secara tidak langsung menyebabkan Hindia-Belanda menjadi salah satu sasaran Jepang.

Perang Pasifik meletus dari 1942 sampai dengan 1945, namun Belanda yang kalah dalam masa-masa awal perang akhirnya menyerah pada bulan Maret 1942 (Budi Susanto, 2007:102). Apabila meninjau kondisi politik sampai masa-masa akhir penjajahan Belanda, sebetulnya telah timbul kekecewaan mendalam di kalangan Islam karena semua tuntutan ditolak oleh pemerintah Hindia-Belanda. Dalam hal ini Belanda memang lebih memilih berunding dengan kelompok nasionalis (sekuler), yang menurut mereka dianggap lebih representatif mewakili Indonesia. Demikianlah kemenangan Jepang dalam perang pasifik awalnya dipandang sebagai harapan baru bagi seluruh rakyat Indonesia. Radio Tokyo mengumumkan bahwa tujuan perang fasifik

adalah mengusir orang-orang Eropa dari Asia, bahkan Jepang menyebut negaranya sebagai 'Saudara Tua Asia.' (Tjandrasasmita, 2008: 273).

Pada tanggal 24 Oktober 1943, Jepang membentuk organisasi federatif baru, yakni Masyumi (Majelis Syura Muslim Indonesia) yang diketuai oleh K.H. Hasyim Asy'ari dan wakilnya Wondoamisino dari PSII. Demikianlah fungsi dari Masyumi adalah menaungi seluruh organisasi muslim seperti, Muhammadiyah, NU, dan Persis. Pada awalnya, Masyumi memang tunduk pada ketentuan politis yang dikehendaki Pemerintah Jepang, namun mulai berusaha berkelok. Dalam wadah Masyumi semua organisasi Islam bersatu sehingga memiliki kekuatan yang lebih unggul dan memiliki posisi tawar yang lebih besar daripada kalangan nasionalis. Namun pada masa-masa menjelang proklamasi, setelah BPUPKI dibentuk, pemerintah Jepang justru memberikan porsi lebih besar pada kalangan nasionalis (Ricklefs, 2008: 435), dan inilah cikal-bakal dominasi kalangan nasionalis dalam percaturan politik Indonesia dewasa ini.

b. Situasi Politik PSII Menjelang Kemerdekaan

Perpecahan yang terjadi di tubuh PSII adalah bagian yang paling menarik untuk dideskripsikan dalam sub-bab ini karena demikianlah situasi politik dalam tubuh partai PSII menjelang kemerdekaan Indonesia. Berbagai perbedaan konseptual dalam menjalankan partai telah menimbulkan problematika tersendiri di tubuh partai. Perpecahan tersebut sebetulnya mulai terjadi setelah Tjokroaminoto wafat, yakni pada tanggal 17 Desember 1934, dan pimpinan PSII diserahkan kepada Haji Agus Salim. Pelimpahan posisi tersebut mengingat kontribusi Haji Agus Salim terhadap partai sejak tahun 1922, serta dedikasinya dalam mewakili partai dalam keanggotaan Volksraad (dewan rakyat), namun sikap yang diambil oleh PSII pada 1924 membuatnya keluar dari Volksraad dan mengalami serangkaian tekanan politik dari dalam tubuh PSII sendiri.

Sebetulnya, awal dari perpecahan disebabkan oleh pengambilan sikap partai yang terbukti tidak didukung penuh oleh seluruh tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam tubuh partai. Adapun sikap partai yang dimaksud adalah mengacu pada hasil keputusan Kongres PSII pada tanggal 8-11 Agustus 1924 di Surabaya, bahwa Partai Sarekat Islam mengambil sikap non-kooperatif terhadap pemerintah, yang dirumuskan dengan istilah '*hijrah*' (Suratmin. *R.M. Abikusno Cokrosuyoso*, 1982: 39). Politik hijrah ini terbukti tidak membawa perubahan yang kondusif, tidak menjadi solusi atas penderitaan rakyat, bahkan kondisi PSII makin terpuruk. Dengan demikian muncul dilema dalam tubuh partai karena sikap non-kooperatif yang dianut mulai dirasakan sebagai kekangan.

Pada awal tahun 1935, Haji Agus Salim mulai menyadari bahwa sikap non-kooperatif yang dianut partai harus ditinggalkan. Pada tanggal 7 Maret 1935, ia mengusulkan kepada Dewan Partai untuk meninjau ulang kelemahan sikap non-kooperatif tersebut, yang dibahas di Kongres PSII di Malang. Hasil dari usulan tersebut menimbulkan bentrok antara pihak yang setuju dan tidak setuju. Haji Agus Salim menyatakan pula dalam kongres tersebut bahwa apabila usulan untuk menghilangkan sikap non-kooperatif dalam kongres tidak mendapat persetujuan yang bulat, maka posisi pimpinan partai akan ditinggalkan.

Di sisi lain Dewan Partai dan Majelis Tanfidziyah tetap berkehendak bahwa posisi pimpinan partai harus tetap dipegang oleh Haji Agus Salim. Namun pihak yang kontra dengan Haji Agus Salim, yakni Abikusno Tjokrosujoso dan Kartosuwiryo tetap berpegang teguh pada sikap non-kooperatif (politik hijrah) (Rambe Safrizal, 2008: 269). Sehingga keduanya pun menyatakan akan mengundurkan diri. Demikianlah, aksi kedua tokoh tersebut dapat dikatakan sebagai sikap politik.

Selisih paham terus terjadi di tubuh PSII yang pada akhirnya bermuara pada pengunduran Haji Agus Salim dari posisi ketua. Pengunduran diri tersebut disetujui dalam kongres yang diadakan tanggal 8 – 12 Juli 1936. Selanjutnya kongres menunjuk Abikusno Tjokrosujoso sebagai ketua, sedangkan Haji Agus Salim beserta para pengikutnya, secara resmi keluar dari tubuh partai. Selanjutnya pada tanggal 28 November 1936, para pengikut Haji Agus Salim membentuk panitia yang bernama Barisan Penyedar Partai Sarekat Islam Indonesia (Mukayat, 1985: 55). Tujuan dari panitia tersebut adalah menyadarkan seluruh pengikut Abikusno Tjokrosujoso yang dipandang tidak dapat dipertanggung-jawabkan. Acuanannya adalah telah terjadi penyelewengan atau penyimpangan orientasi partai jika dilakukan pemahaman atau peninjauan mendalam dari asas-asas yang sudah dipegang oleh pendiri Sarekat Islam. Dalam arti khusus, sikap non-kooperatif akan melemahkan posisi PSII.

Pada kongres partai PSII yang ke 23 tahun 1937 di Bandung, di bawah pimpinan Kartosuwiryo dibentuklah suatu komisi yang harus menyusun suatu "program aksi hijrah" (Daftar Usaha Hijrah PSII). Akan tetapi sangat disayangkan sekali program yang baik tersebut tidak bisa terwujud melalui partai seperti yang direncanakan semula, karena dalam beberapa tahun kemudian situasi dalam partai PSII mengalami perubahan haluan politiknya.

Barisan Penyedar Partai Sarekat Islam setelah terbukti gagal menyadarkan kekeliruan yang menjadi prinsip Partai Sarekat Islam, akhirnya membentuk partai baru, yakni Pergerakan Penyedar. Secara ideologis prinsip yang dianut oleh Partai Islam Indonesia dan Pergerakan Penyedar adalah sama, yakni sama-sama kooperatif dengan pemerintah, namun dikarenakan perselisihan antara Haji Agus Salim dan Sukiman, maka kedua partai tersebut berjalan sendiri-sendiri. Demikianlah, Haji Agus Salim berusaha mendapatkan kedudukan dalam Volksraad, meskipun hasilnya adalah penolakan dari pemerintah.

Pada tahun 1939 krisis politik di tubuh PSII makin memuncak, di mana pada tahun tersebut Kartosuwiryo menulis risalah tentang hijrah yang kemudian justru ditolak oleh dewan partai. Kebijakan politik hijrah lagi-lagi mengundang konflik, yang melibatkan dua tokoh utama partai, yaitu Abikusno dan Kartosuwiryo, dan pada gilirannya menyebabkan hubungan mereka menjadi retak. Di satu pihak Kartosuwiryo konsekuen melaksanakan putusan kongres PSII 1938, tetap tegar dengan strategi hijrah sebagaimana telah disepakati bersama. Di pihak lain, Abikusno justru bersikap sebaliknya, karena pertimbangan-pertimbangan tertentu ia meninggalkan politik hijrah dan beralih kepada garis parlementer. Pada akhirnya Abikusno bergabung dengan partai-partai politik lain ke dalam federasi politik nasional.

Menghadapi kenyataan tersebut Kartosuwiryo tetap berpegang pada pendiriannya sehingga mendapati pemecatan dari tubuh PSII, yakni pada saat kongres PSII ke-50 (Januari 1940) di Kota Palembang (Pringgodigdo, 1977: 979). Melalui keputusan yang diambil komite eksekutif partai, maka resmilah pemecatan Kartosuwiryo, Joesoef Taoedjiri, Aksis, Kamran dan Soekoso dengan perimbangan 134 suara setuju, sembilan suara netral. Diputuskan pula dalam kongres tersebut bahwa pelaksanaan program aksi hijrah tidak lagi diteruskan dan komisi yang sebelumnya ditugaskan untuk menyusun program tersebut akan dibubarkan. Semua anggota PSII dilarang untuk memasuki partai yang dibentuk oleh Kartosuwiryo. Yakin dapat berdiri sendiri dengan para pengikutnya di Jawa Tengah, Kartosuwiryo tetap menyiarkan risalah hijrahnya. Demikianlah pada tanggal 24 Maret 1940, Kartosuwiryo mengadakan rapat umum di Malangbong untuk membentuk Komite Pertahanan Kebenaran Sarekat Islam Indonesia (Djoened Poesponegoro, 1986: 394).

Komite tersebut berdiri sendiri dan berada di luar PSII dan seakan-akan membuat tandingan dengan menggunakan bendera yang sama dan pengaturan struktur organisasinya. Dengan kata lain, perbedaannya adalah Pertahanan Kebenaran Sarekat Islam Indonesia lebih teguh berpegang

secara konsisten dan mendalam pada politik hijrah. Perbedaan tersebut terus dipertahankan hingga akhir masa penjajahan.

Demikianlah berdasarkan deskripsi dinamika politik yang terjadi di PSII sejak wafatnya Tjokroaminoto 1934 hingga 1940-an di atas, serangkaian pergolakan politik internal telah menjadikan perpecahan sehingga Sarekat Islam (SI) pun terpecah menjadi empat, yaitu: PSI Abikusno, PSI Kartosuwiryo, PSII Sukiman, dan Pergerakan Penyedat Haji Agus Salim.

c. Konsep Dan Pemikiran Politik Hijrah Kartosuwiryo

1) Riwayat Dan Perjuangan Politik Kartosuwiryo

Sekarmadji Maridjan Kartosuwiryo, adalah nama lengkap dari Kartosuwiryo. Lahir pada tanggal 7 Februari 1905 di Cepu, sebuah kota kecil antara Blora dan Bojonegoro, daerah perbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah. Nama aslinya adalah Sekarmadji, sedangkan Maridjan Kartosuwiryo adalah nama ayahnya yang berprofesi sebagai seorang pegawai Gubernur Hindia Belanda dengan jabatan mantra kehutanan. Pada tahun 1901, Belanda menetapkan politik balas budi. Penerapan politik etis ini menyebabkan banyak sekolah modern yang dibuka untuk penduduk pribumi. Kartosuwiryo adalah salah seorang anak negeri yang berkesempatan mengenyam pendidikan modern. Hal ini disebabkan karena ayahnya memiliki kedudukan yang cukup penting sebagai seorang pribumi saat itu.

Pada usia enam tahun Sekarmadji masuk Sekolah Rakyat (*Tweede Inlandsche School*) di desa Pagotan Rembang, dan empat tahun kemudian, 1915, dipindahkan ke *Hollandsch Inlandsche School* (HIS). *Hollandsch Inlandsche School* (HIS) merupakan sekolah (rendah) kelas 1 untuk anak-anak orang Indonesia. Bagi anak-anak mereka yang kurang mampu, bukan pegawai negeri dengan jabatan tertentu disediakan sekolah (rendah) kelas II (2 de Kalsse School). Jumlah HIS terbatas pada kota-kota besar saja, oleh karena itu anak-anak dari orang tua kurang mampu yang bisa diterima di HIS sangat terbatas dan uang sekolah agak tinggi pada zaman itu (Emdeman, 1986: 161).

Selanjutnya Kartosuwiryo diterima menjadi siswa *Europeesche Lagere School* (ELS), sekolah rendah bagi anak-anak Eropa di Bojonegoro dari tahun 1919 dan tamat 1923 saat usianya menginjak 18 tahun. Sesudah menamatkan seluruh pelajaran di Hogere Burgelijks School (HBS), Sekarmadji pun melanjutkan pelajaran di *Nederlands Indische Artsen School* (NIAS), yaitu salah sebuah sekolah tinggi kedokteran yang ada di Surabaya. *Nederlands Indische Artsen School* (NIAS) sebenarnya berawal dari Sekolah Dokter Jawa yang lahir sejak 2 Januari 1849, kemudian pada tahun 1875 diubah menjadi Ahli Kesehatan Bumiputra (*Inlandsch Geneeskundige*). Dalam perkembangannya pada tahun 1902 menjadi dokter Bumiputra (*Inlandch Geneeskundige*), mengalami perubahan nama kembali menjadi STOVIA (*School Tot Opleiding Van Indische Artenschool*), yang kemudian pada tahun 1913 diubah menjadi NIAS (*Nedelandsch Indische Artenschool*) (Sugiharsono, dkk. 2008: 72)

Sejak duduk di tingkat pertama NIAS 1926, Kartosuwiryo telah aktif terjun ke dalam partai politik, sehingga ia hanya bertahan sampai tingkat empat, untuk kemudian dikeluarkan karena akibat kegiatan politik yang dilakukannya dalam Liga Pemuda Islam (*Jong Islamieten Bond*). Latar belakang berdirinya JIB muncul pada saat kongres Jong Java pada tahun 1924, pada saat itu organisasi ini mendapat desakan dari Agus Salim agar Jong Java berpolitik dan memasukkan unsur agama Islam sehingga mendapat dukungan lebih banyak, namun usulan tersebut ditolak oleh sebagian besar peserta kongres. Melalui JIB atau Liga Pemuda Islam membawa Kartosuwiryo menjadi salah satu pencetus gerakan pemuda yang dikenal dengan nama "Sumpah Pemuda" (Sardiman, Yudhistira, 2008: 204).

Setelah dikeluarkan dari NIAS karena kegiatan politiknya untuk beberapa waktu lamanya Kartosuwiryo memilih bekerja menjadi guru swasta di Bojonegoro. Di Bojonegoro inilah Kartosuwiryo mengenal guru rohaninya, yakni Notodiharjo (seorang tokoh Islam modern Muhammadiyah). Dialah yang menanamkan pemikiran Islam modern kepada Kartosuwiryo, sehingga pemikirannya sangat mempengaruhi sikap Kartosuwiryo dalam mengimplementasikan ajaran Islam di berbagai bidang, khususnya di bidang politik (<https://www.islampos.com>)

2) Politik Hijrah: Dasar Pemikiran Kartosuwiryo

Mulai dari perjalanan awal politik semenjak masih di NIAS hingga mengenal pemikiran Islam modern dan kemudian memiliki keinginan untuk menerapkan ajaran Islam dalam berbagai aspek. Disebutkan juga karena pengaruh dari pamannya yang sangat kuat, semakin membangkitkan minat Kartosuwiryo untuk memperdalam ilmu di bidang politik, sehingga tidak mengherankan Kartosuwiryo tumbuh menjadi pribadi yang memiliki kesadaran politik dan sekaligus memiliki integritas ke-Islaman yang tinggi. Hingga kemudian Kartosuwiryo terjun dalam partai pimpinan HOS Tjokroaminoto dalam partai Syarekat Islam yang dikembangkan menjadi PSII. Dalam bab I juga disampaikan bahwasanya PSII memiliki azas politik yang dipegang bersama dalam memperjuangkan cita-citanya menuju Indonesia yang merdeka.

Pada masa Kartosuwiryo menjabat sebagai sekretaris PSII, azas politik yang dianut partai oleh Kartosuwiryo diperjelas dengan jalan memilih sikap independen (*non-cooperatif*) terhadap pemerintahan Hindia-Belanda. Menurutnya dengan bersikap coperatif terhadap Hindia-Belanda sulit bagi kaum Muslim untuk merengkuh keimanan. Berdasarkan hal tersebut kita menjadi lebih paham akan gambaran pemikiran politik Kartosuwiryo, dengan gambaran tambahan perjuangannya untuk mewujudkan Daulah Islamiyah.

Sikap tersebut ditunjukkan oleh Kartosuwiryo dalam penolakan terhadap kursi menteri yang diberikan pada masa cabinet Amir Syarifuddin karena ia merasa belum terlibat dengan PSII dan masih merasa terikat dengan Masyumi. Hal ini bukan semata-mata dikarenakan ia masih terikat dengan Masyumi, hanya saja ia tidak ingin memperkeruh politik seperti yang telah dilakukan para politikus komunis, ia juga ingin menarik diri dari gelanggang politik pusat (Merdeka, 1970: 7). Selain itu Kartosuwiryo juga tidak menyukai pemikiran politik yang digunakan oleh Amir Syarifudin yang terlalu condong ke arah kiri ketika menjabat menjadi menteri pertahanan. Pemikiran politik hijrah Kartosuwiryo telah menjadikan dirinya sebagai sosok politikus yang tegas dan disiplin akan prinsip politiknya.

Dengan demikian politik hijrah bisa dikatakan menjadi dasar pemikiran Kartosuwiryo yang berbasis perjuangan terhadap keimanan Islam. Keimanan dalam Islam perlu diwujudkan dalam tatanan perilaku sehari-hari dalam beribadah kepada Allah SWT, serta hubungannya dengan makhluk Allah SWT. Di mana dalam tatanan pemerintahan yang ada pada saat itu tidak bisa menjamin dapat terwujudnya tatanan kehidupan yang Islami, jika Indonesia tidak bisa berdiri sendiri dan masih dalam naungan Hindia Belanda dalam parlemen.

Pemikiran tersebut menunjukkan bahwasanya Kartosuwiryo tidak suka terhadap Belanda karena dapat menghalangi tercapainya Daulah Islamiyah. Hal tersebut tertuang pada 1928, yakni Kartosuwiryo menyerang sengit perayaan ulang tahun ratu Belanda, karena ratu Belanda bukanlah pahlawan ataupun pejuang “bangsa kita”, dan pada tahun berikutnya Kartosuwiryo menegaskan bahwa “Nasionalisme dalam Islam “ itu “ bukan ‘olahraga’ atau ‘ pengisi waktu’ juga bukan ‘tempat mencari kepuasan’, melainkan suatu ‘kewajiban’.” (R.E. Elson, 2009: 121-122).

Pemikiran politik Kartosuwiryo dapat dikatakan pangkal terwujudnya Negara Islam, yang mana pemikiran tersebut tidak jauh dari pemikiran Tjokroaminoto melalui PSII, memandang

dirinya sebagai perwujudan lokal gerakan internasional pan-Islamisme yang lebih luas. “Kita tak akan bisa beragama Islam sepenuhnya,” Tjokroaminoto dilaporkan berkata demikian pada 1927, “kalau orang-orang mukmin belum merdeka di tanah sendiri”, dan di rapat lain pada waktu yang berdekatan Tjokroaminoto menyatakan bahwa “hanya dalam kemerdekaanlah kaum mukmin bisa menjalankan kewajiban dengan sempurna. Ada ratusan perintah dalam Quran, yang semuanya wajib dijalankan. Namun, kita tak bisa menjalankannya sekarang. Kita baru akan bisa menjalankannya kalau kita merdeka.” Berdasarkan hal tersebut maka pemikiran politik Kartosuwiryo jelas terpengaruh oleh Tjokroaminoto, dan merupakan pemikiran esensial demi terwujudnya Islam di negara Indonesia. Di samping itu, berbagai pengaruh pemikiran nasionalis juga diperoleh dari semasa kuliahnya dalam mempelajari Islam, seperti disebutkan bahwasanya Kartosuwiryo “terasuki” oleh shibghhatullah sehingga ia kemudian menjadi Islam *Minded* dan semua aktivitasnya kemudian hanya untuk mempelajari Islam semata dan berbuat untuk Islam saja.

3) Politik Hijrah dan Arah Pembentukan Negara Islam Indonesia

Pandangan Kartosuwiryo tentang Negara Islam didasarkan pada proses mula terbentuknya masyarakat Islam pada masa Rasulullah SAW di awal abad pertama Hijriyah. Pada saat itu, keragaman etnis, budaya, agama dan bahasa sangat beragam sama seperti ketika Indonesia memulai revolusi integratifnya pada pertengahan paruh 1945. Pandangan tersebut hingga berujung pada pergerakan Kartosuwiryo dalam menyusun upaya persiapan deklarasi kemerdekaan Islam yang pergolakannya di hadapan rakyat lebih kuat dilakukan oleh PPKI.

Berdasarkan pemahaman di atas, apabila Negara Islam didasarkan pada masa Rasulullah SAW, maka segala ketentuan yang ada seperti syariat atau hukum yang berlaku di Indonesia didasarkan pada ajaran Rasulullah. Hal tersebut dapat terlihat dari pernyataan-pernyataan Kartosuwiryo yang tertuang di dalam buku PDB (Pedoman Dharma Bakti) yang menjadi rujukan sistem perjuangan mendirikan Negara Islam Indonesia. PDB itu sendiri berisi beberapa hal, antara lain: Qanun Asasi, Statemen dan Surat-surat kenegaraan, Manifesto politik serta maklumat-maklumat (aturan-aturan pemerintah).

Salah satu upaya persiapan yang dilakukan oleh Kartosuwiryo dalam kemerdekaan Islam adalah meminta restu Panglima Besar Jenderal Soedirman untuk tetap berada di Jawa Barat dan ia pun merestuinnya. Hal ini dibuktikan dengan sebuah pesan yang berisi :

“Bung Tomo, bapak pahlawan pemberontak Surabaya pada 10 November dan mantan menteri dalam negeri Kabinet Burhanudin Harahap, dalam sebuah buku kecil berjudul “Himbauan” yang ditulis ia pada tanggal 07 September 1977, mengatakan Pak Kartosuwiryo telah mendapatkan restu dari Panglima Besar Jenderal Soedirman.”

Negara Islam Indonesia atau Darul Islam merupakan puncak cita-cita dari Kartosuwiryo yang sangat ingin dicapainya. Baginya membentuk negara Islam Indonesia ini merupakan perjuangan yang gagah berani, dan tak ada yang bisa menahannya sekalipun banyak pihak-pihak yang mengatakan bahwa Negara Islam Indonesia ini tidak ada dalam Al Qur’an sesuai dengan apa yang menjadi landasan dari Negara Islam Indonesia tersebut. Bahkan bukan saja dari pihak-pihak yang berkuasa yang berpendapat seperti itu, namun kaum muslim yang berpegang teguh terhadap agamanya dan beintelektual tinggi juga banyak yang berpendapat seperti itu. Namun hal ini tidak pernah menyurutkan semangatnya, dan ia menjelaskan dengan sangat bijaksana bahwasanya meskipun di dalam Al Qur’an tidak pernah tertulis kata “Darul Islam” atau negara Islam, namun ketika didalami lebih jauh tentang pengetahuan Islam terutama tafsir Al Qur’an maka tidak akan ada kata ragu bahwa akan banyak ayat yang ditemukan yang mengarah pada Negara Islam. Seperti dalam sebuah ayat dalam Al Qur’an surat Al-Baqarah ayat 208, yang artinya,

“Masuklah kalian ke dalam Islam secara total menyeluruh, dan janganlah kalian ikuti langkah-langkah syeton”.

Maksud dari ayat tersebut adalah umat Islam haruslah hidup berdasarkan Islam, baik di bidang politik, ekonomi, pendidikan, kebudayaan, keluarga, lingkungan, dan lain sebagainya bukan hanya dirinya sendiri tetapi seluruh aspek kehidupan. Akan tetapi hal ini tidak pernah direnungkan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu tertulis dengan jelas bahwa di dalam Al Qur'an terdapat larangan untuk mengikuti langkah-langkah setan karena hal tersebut sungguh merugikan diri kira sendiri dan menyesatkan kaum muslimin. Dalam manifesto politiknya Kartosuwiryo inilah ia mengajak agar umat Islam meneguhkan hukum Islam yang sesuai dengan Al Qur'an dan Sunnah Rosul dalam Negara Islam Indonesia yang diperjuangkan mati-matian olehnya.

Hal itu akan sejalan dengan pandangannya terhadap Negara Islam Indonesia yang tercerminkan dari pemahaman keagamaan seperti yang telah dicontohkannya yaitu menumbuhkan kemauan keras dalam jiwa –jiwa pasukannya, tidak lemah dalam membela kebenaran, serta melatih fisik agar tetap kuat agar dapat mengemban tugas yang kuat dan merealisasikan cita-cita untuk mendirikan Negara Islam yang kuta, membela kebenaran, dan menegakkan keadilan.

4) Aktualisasi Politik Hijrah

Pada umumnya istilah hijrah dikenal oleh kaum muslimin mengacu pada sejarah Islam, hijrah syar'i dan hanya terjadi dua kali saja. Pertama, yakni hijrahnya para sahabat Nabi ke Ethiopia. Kedua, hijrahnya Nabi Muhammad dan kaum muslimin ke Madinah. Setelah dua peristiwa tersebut, maka hijrah tidak ada lagi. Apabila istilah hijrah dipakai di luar dua konteks sejarah tersebut, maka tidak memiliki landasan syari'ah.

Berdasarkan pemahaman di atas, maka konteks hijrah yang diperjuangkan oleh Kartosuwiryo memiliki esensi dan makna yang jauh berbeda dari pandangan sejarah Islam. Dalam hal ini, istilah hijrah dapat dikatakan dipinjam atau, digunakan untuk mewakili makna lain dalam pergulatan politik sejak masa-masa akhir pemerintahan Hindia-Belanda, Masa Pendudukan Jepang, dan masa-masa menjelang kemerdekaan. Membahas tentang aktualisasi politik hijrah maka erat kaitannya dengan aktualisasi Iman, Hijrah dan Jihad. Hijrah dalam terminologi al-Qur'an merupakan pola dan strategi perjuangan fi sabilillah menuju futuh dan falah. Di samping perintah Allah yang wajib dijalankan, pada masa Nabi, hijrah juga merupakan tindakan praktis gerak langkah serta strategi perjuangan yang pada gilirannya menjadi titik awal kemenangan Islam dan kejayaan kaum muslimin. Di setiap tempat dimana kata hijrah digunakan dalam al-Quran, selalu diawali dengan *iman*, kemudian diikuti dan diasosiasikan dengan *jihad*. Tidak ada tindakan hijrah dianggap shahih (abshah) manakala dalam hijrah tersebut, ketika iman dan hijrah tidak disertakan. Wujud nyata dari tindakan hijrah adalah ketika seorang muslim bukan sekedar bersungguh-sungguh dalam memperjuangkan cita-cita keislaman namun juga haruslah disertai dengan keimanan yang lurus dan ikhtiar secara benar.

Aktualisasi politik hijrah Kartosuwiryo juga diwujudkan dalam upaya menyiapkan sumber daya manusia yang siap mendukungnya dalam mewujudkan cita-citanya, upaya tersebut ia lakukan dengan membangun suatu gerakan yang didukung oleh kekuatan dan perhitungan serta konsep yang matang. Ia mendidik para mujahid, pioner-pioner muda muslim menjadi jundullah yang berjuang semata-mata lillahita'ala. Maka di suatu daerah yang terletak di pinggir jalan antara Malangbong Belubur Limbangan, Garut Jawa Barat, didirikan sebuah laboratorium Qur'ani yang bernama *Institut Shuffah*. Institut ini tidak saja didatangi oleh siswa-siswa dari Banten dan sekitarnya, tapi juga dari Wonorejo, Cirebon bahkan dari Toli-toli Sulawesi Selatan. Tenaga

pengajarnya adalah ulama-ulama terpilih antara lain: Yunus Anis (Bandung), Yusuf Taujiri (Wonorejo), Mustafa Kamil (Tasik Malaya), Abdul Qudus, Ghazali Tusi (Malangbong) dan R. Oni Qital (Tasik Malaya), Abu Suja', Ais Kartadinata dan tokoh ulama lainnya.

Institut Shuffah tempat mendidik mujahid-mujahid fisabilillah, tidak hanya soal keagamaan, tapi juga diajarkan ilmu kemiliteran serta kenegaraan. Tujuannya jelas, melahirkan kader-kader hizbullah yang militant dan tahan uji, yang memiliki kualifikasi shabirun dan muttaqin, sebagai salah satu pondasi dan tiang utama, serta penyokong utama berdirinya Negara Islam Indonesia.

Wujud lain dari aktualisasi yang dilakukan Kartosuwiryo adalah pembentukan Tentara Islam Indonesia. Pada tahun 1948, kira-kira setahun sebelum NII diproklamasikan, sudah lebih dulu dibentuk pasukan militer TII (Tentara Islam Indonesia). Lahirnya TII adalah gabungan dari berbagai kesatuan aksi militer yang semuanya bertujuan sama, yakni mengusir Belanda dari bumi Indonesia. Di antara faksi-faksi militer yang bergabung menjadi TII antara lain: DEMUI (Dewan Mobilisasi Ummat Islam), PADI (Pahlawan Darul Islam), Pasukan Elang dan bahkan disebut-sebut juga pasukan Jepang yang menyerah. Dari penjelasan ini juga dapat di ketahui bahwa bentuk aktualisasi politik hijrah Kartosuwiryo adalah perjuangannya bersama TII dalam melawan penjajah Belanda.

Puncak dari aktualisasi politik hijrah Kartosuwiryo adalah ketika cita-cita besar yang selama ini terus diperjuangkan, harapan terwujudnya dan juga tegaknya syariat Islam di Indonesia yakni dengan memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia. Setelah dikeluarkan Maklumat Imam No. 5, setelah 9 bulan diserukannya perang suci melawan penjajah Belanda, saatnya telah tiba untuk memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia. Proklamasi NII akhirnya dikumandangkan ke seluruh dunia pada tanggal 12 Syawal 1368 H bertepatan dengan 7 Agustus 1949 M, di sebuah desa bernama Gunung Cepu, Tasikmalaya Jawa Barat.

4. Kesimpulan

Setelah mengkaji politik hijrah Sekarmadji Maridjan Kartosuwiryo, diperoleh tiga kesimpulan sebagai berikut. Pertama, berbagai pergolakan politik Bangsa Indonesia yang terjadi pada masa menjelang kemerdekaan lebih mengacu pada problematika politik antar-partai. Berdasarkan kenyataan yang ada, maka ditemuilah paling tidak dua kelompok besar yang saling bersaing, yakni partai yang berhaluan nasionalis dan partai yang berhaluan Islam. Seluruh partai Islam digabung dalam wadah Masyumi, namun karena semakin meresahkan pemerintah Jepang, maka menjelang kemerdekaan, Jepang memilih kelompok Nasionalis untuk mempersiapkan Kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya situasi politik PSII pada saat menjelang kemerdekaan pada dasarnya tengah terjadi problematika tersendiri dari dalam tubuh partai. Haji Agus Salim, Sangaji, Mohamad Roem, Sabirin, dan 23 anggota fraksinya dikeluarkan dari tubuh partai. Pergolakan terus terjadi dalam tubuh PSII sehingga terpecah menjadi empat, yakni PSI Abikusno, PSII Kartosuwiryo, PSII Sukiman, dan Gerakan Penyedat Haji Agus Salim.

Kedua, perjuangan politik Kartosuwiryo pada dasarnya merupakan bentuk penolakan atas pemerintah Hindia Belanda. Perjuangan tersebut tidak dilakukan dalam kurun waktu singkat, tetapi sudah terlihat ketika dia bekerja sebagai redaktur *Koran Fajar Asia*. Keterlibatan secara aktif dalam Sarekat Islam telah mempengaruhi konsep pemikirannya, khususnya terkait politik hijrah, meskipun pada akhirnya membawa perseteruan panjang dalam tubuh PSII. Setelah dikeluarkan dari kepengurusan partai, Kartosuwiryo tetap konsekuen menjalankan politik hijrahnya dengan pindah ke Jawa Barat (Malangbong), di mana dia makin berpengaruh di kemudian hari karena posisi Jawa Barat sangat strategis. Selama di Malangbong Kartosuwiryo

mengelola dan memfungsikan Institut Suffah, dengan konsentrasi pendidikannya pada militer, yang kemudian berpengaruh dalam pembentukan Negara Islam Indonesia (NII).

Ketiga, konsep pemikiran politik hijrah Kartosuwiryo merupakan bentuk perjuangan berbasis Islam, yang berupaya mewujudkan Negara yang Islami dengan memilih sikap non-kooperatif terhadap Pemerintahan Hindia Belanda. Pemikiran tersebut diwujudkan dengan upaya mengadakan konferensi dengan Masyumi dan menunjuk K.H Mochtar sebagai ketua umum, yang secara massif membahas tentang haluan Negara Islam. Oleh karena itu Kartosuwiryo memiliki pandangan tersendiri terhadap Negara Islam, yakni Islam sebagai ideologi yang sangat berpengaruh dalam kehidupan dan politik. Negara Islam Indonesia merupakan puncak perjuangan politik Kartosuwiryo, yang diproklamasikan pada tanggal 7 Agustus tahun 1949 di Jawa Barat.

Daftar Pustaka

- Ananta Toer, (2003). *Kronik Revolusi Indonesia 1948*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Aning S. (2005). *100 Tokoh yang Mengubah Indonesia: Biografi Singkat Seratus Tokoh yang Paling Berpengaruh dalam Sejarah Indonesia di Abad 20*. Jakarta: Penerbit Narasi.
- Anshori. (2010). *Sejarah Nasional Indonesia: Masa Prasejarah sampai Masa Proklamasi Kemerdekaan*. Jakarta: PT Mitra Aksara Panaitan.
- Ansyari, Saifuddin. (2004). *Wawasan Islam: Pokok-Pokok Pikiran Tentang Paradigma dan Sistem Islam*. Jakarta: Gema Insani,
- Awwas Irfan. (1999). *Menelusuri Perjalanan Jihad S.M. Kartosuwiryo*. Yogyakarta: Wihdah Press.
- Budi Susanto, (2007). *Sisi Senyap Politik Bising*, Yogyakarta: Kanisius.
- Chaidar. (1999). *Pemikiran Politik Proklamator Negara Islam Indonesia S.M. Kartosoewiryo: Fakta dan Data Sejarah Darul Islam*. Yogyakarta: Penerbit Darul Falah.
- Cribb Robert. (2004). *Historical Distionary of Indonesia*. United Kingdom: Scarecrow Press.
- Darul Aqsha, (2005). *Kiai Haji Mas Mansur, 1896-1946: Perjuangan dan Pemikiran*, Jakarta: Erlangga.
- E. Elson. R. (1999). *The Idea of Indonesia: Sejarah Pemikiran dan Gagasan*. Jakarta: Penerbit buku Serambi.
- Emdeman. (1986). *Dr. Cipto Mangunkusumo Pahlawan Pergerakan Nasional*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Gootschalk Louis. (1975). *Mengerti Sejarah*, terj. Nugroho Notosusanto. Jakarta: UI Press.
- H. Dangel Holk. (1995). *Daarul Islam dan Kartosuwirjo*. Yogyakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Herry Mohammad. (2006). *Tokoh-Tokoh Islam yang Berpengaruh Abad 20*. Jakarta: Gema Insani Press
- Hoesein Rushdy. (2010). *Terobosan Soekarno dalam Perundingan Linggarjati*, Jakarta: Penerbit Kompas.
- Holk H. Dangel, *Daarul Islam dan Kartosuwiryo*, Yogyakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995.
- <http://www.andyonline.net/2011/05/nii-dalam-jejak-jihad-sm-kartosuwiryo.html>, (diunduh pada 12 Maret 2019, pukul 20.35 WIB).
- <https://www.Islampos.com/menelusuri-perjalanan-jihad-Kartosuwiryo-1-15401/> (diunduh pada 16 Februari 2019 Pukul 21.25 WIB).
- Irfan S. Awwas, (2008). *Jejak Jihad SM. Kartosuwiryo*, Yogyakarta: Uswah.

- Merdeka. (1974). *Susunan dan Program Kabinet Republik Indonesia* Munawar, Budhy. *Argumen Islam untuk Sekularisme: Islam Progresif dan Perkembangan*.
- Mukayat. (1985). *Haji Agus Salim. Karya dan Pengabdiannya*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Muljana. (2008). *Kesadaran Nasional: Dari Kolonialisme Sampai Kemerdekaan*. Yogyakarta: LKiS.
- Munawar Budhy. (2010). *Argumen Islam untuk Sekularisme: Islam Progresif dan Perkembangan Diskursusnya*. Jakarta: Grasindo.
- Poesponegoro Djoened. (1986). *Sejarah Nasional Indonesia V: Zaman Kebangkitan Nasional dan Masa Hindia Belanda*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Pringgodigdo. (1977). *Ensiklopedia Umum*, Yogyakarta: Kanisius.
- Rambe Safrizal. (2008). *Sarekat Islam Pelopor Nasionalisme Indonesia 1905-1942*. Jakarta: Yayasan Kebangkitan Insan Cendikia.
- Ricklefs dan Calvin. (2008). *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*, Versi Terjemahan Bahasa Indonesia. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta,
- Robert Cribb, (2004). *Historical Distionary of Indonesia*, United Kingdom: Scarecrow Press.
- S. Awwas Irfan. (2008). *Jejak Jihad SM. Kartosuwiryo, mengungkap fakta yang didustakan*. Cet.V. Yogyakarta: Uswah.
- Sardiman. (2008). *Sejarah 2 Program Ilmu Sosial*. Jakarta: Yudhistira.
- Sugiharsono, dkk. (2008). *Ilmu Pengetahuan Sosial Sekolah Menengah Pertama*. Jakarta: Grasindo.
- Suratmin. (1982). *R.M. Abikusno Cokrosuyoso: Hasil Karya dan Pengabdiannya*. Jakarta: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional dan Nilai Tradisional, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Susanto Budi. (2007). *Sisi Senyap Politik Bising*. Yogyakarta: Kanisius.
- Tjandrasasmita, (2008). *Arkeologi Islam Nusantara*, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Yudi Latif, (2005). *Inteligensia Muslim dan Kuasa: Genealogi Inteligensia Muslim Indonesia Abad ke-20*, Bandung: PT Mizan Pustaka.
- Yusuf Yunan, (2005). *Ensiklopedia Muhammadiyah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.